

untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan terwujudnya harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Jadi harga yang adil, menurut hukum Islam, merupakan pegangan yang mendasar dalam transaksi. Wajah substansial dari harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan pedagangnya secara adil, yaitu pedagang memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua yang lalu, hukum Islam memandang bahwa harga yang adil itu ialah harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran yang berbasiskan kerelaan dari kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*) dalam arti bahwa di sana tidak ada pihak yang menzalimi dan terzalimi. Harga yang adil ialah harga yang ditentukan oleh pasar yang sehat, yakni sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah, dan itu telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan

yang wajar dan adil tidak selalu tercapai karena seringkali terjadi gangguan pada mekanisme pasar yang seharusnya berjalan ideal.

Gangguan pada mekanisme pasar itu, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua yang lalu, terjadi karena 4 (empat) faktor. *Pertama*, faktor penipuan. Ini dapat terjadi apabila produsen atau distributor melakukan kolusi dalam penetapan harga (*Conspiratorial Price Fixing*). *Kedua*, ketidaktahuan konsumen terhadap informasi tentang harga pasar suatu komoditi yang berlaku saat itu. Ketidaktahuan konsumen ini lalu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dengan mematok harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. *Ketiga*, penyalahgunaan kuasa dalam bentuk permainan harga oleh pengusaha besar, misalnya dengan melakukan apa yang biasa disebut dengan "banting harga". Aksi banting harga ini dapat mengakibatkan pengusaha kecil rugi karena para pembeli akan lebih memilih berbelanja pada pengusaha besar yang menawarkan harga lebih rendah dari harga pasar. *Keempat*, manipulasi emosi. Maksudnya ialah memanipulasi emosi seseorang dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Misalnya menggunakan kondisi psikologis seseorang yang sedang berkabung.

Dalam kerangka jaminan terhadap keberlangsungan mekanisme pasar bebas dan adil itulah hukum Islam melarang semua tindakan pelaku pasar yang

menimbulkan gangguan terhadap mekanisme pasar yang seharusnya berjalan ideal itu. Di antaranya, sebagaimana telah dijabarkan pada bab kedua, ialah tindakan *tadlis*, yakni kesengajaan pihak-pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi tertentu dari pengetahuan pihak yang lain karena takut --jika informasi tersebut diketahui oleh pihak yang lain-- transaksi tersebut akan terjalin tidak seperti yang diharapkannya. Jadi dalam transaksi yang mengandung *tadlis* terdapat sesuatu yang diketahui oleh satu pihak namun sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh pihak yang lain (*unknown to one party*).

Tidak adanya informasi yang lengkap (*complete information*) pada salah satu pihak jelas akan menyebabkan kekecewaan dan kerugian di pihak yang tidak mengetahui informasi terbaru. Pembeli yang masuk perangkap *tadlis* tentu akan kecewa dan menyesal setelah mengetahui bahwa ia telah tertipu. Karena itu hukum Islam memandang *tadlis* sebagai bagian tindakan zalim terhadap pihak lain.

Tadlis itu sendiri, menurut hukum Islam, bisa berkenaan dengan empat segi, yakni kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Adapun *tadlis* yang berkenaan dengan "harga" atau *ghaban*, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, ialah *tadlis* yang terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan calon

pembeli terhadap harga pasar dengan cara memasang harga tinggi untuk barang dagangannya, jauh di atas harga pasar. Dengan cara itu ia berharap bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar karena barang dagangannya bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dari segi ini jelas bahwa modus "pasang harga tinggi" yang dipraktikkan sebagian pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya, seperti telah disajikan deskripsinya pada bab ketiga, merupakan modus *tadlis* harga yang dilarang.

Tadlis harga tersebut dapat menghadirkan keuntungan lebih besar untuk pihak penjual, namun sebaliknya juga mengakibatkan kerugian terhadap pihak pembeli. Dalam sepuluh kasus yang telah dideskripsikan pada bab ketiga yang lalu tidak ada satu pun dari sepuluh calon pembeli yang menyadari modus "pasang harga tinggi" yang dilancarkan pedagang serta tidak ada pula yang pandai melakukan negosiasi (penawaran) dengan baik sehingga semua mereka akhirnya masuk ke dalam perangkap penjual dan memutuskan untuk membeli pakaian yang mereka inginkan dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Tabel 4.2 berikut ini menggambarkan variasi persentase harga jual di atas harga pasar pada sepuluh kasus jual-beli pakaian dengan modus "pasang harga tinggi" tersebut.

dengan 51,6%. Angka ini menunjukkan kelebihan rata-rata keuntungan yang diraup para pedagang pakaian yang menerapkan modus “pasang harga tinggi” dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pedagang lain yang menjual barangnya dengan harga pasar atau harga normal. Jika dibaca dari perspektif sebaliknya, angka 51,6% itu tadi sesungguhnya adalah angka persentase rata-rata kerugian yang ditanggung oleh pihak konsumen atau pembeli akibat terjebak oleh perangkap modus “pasang harga tinggi” pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya. Perangkap yang dipasang para pedagang tersebut berhasil menggiring para pembeli untuk membayar harga barang sebanyak satu setengah kali harga pasar. Jadi jelas, modus “pasang harga tinggi” yang dilakukan penjual pakaian di Pusat Grosir Surabaya telah membawa sebagian proses transaksi (akad) jual-beli pakaian di sana berlangsung dalam spirit kezaliman pelaku usaha terhadap konsumen atau pembeli.

B. Akibat Hukum Modus “Pasang Harga Tinggi”

Seperti yang baru saja dikemukakan, modus “pasang harga tinggi” yang dilakukan pedagang dalam ragam kasus jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dengan maksud menjebak calon-calon pembeli agar mereka membeli barang dagangannya dengan harga di atas harga pasar merupakan suatu bentuk

Memang secara tersurat, dalil-dalil syara' di atas menegaskan hak *khiyār* untuk pembeli yang menjadi korban tindakan *tadlīs* kualitas (menyembunyikan cacat barang) yang dilakukan penjual. Namun akibat hukum *tadlīs* kualitas itu dapat diberlakukan pula pada *tadlīs* harga melalui pendekatan *qiyās* (analogi) disebabkan adanya kesamaan *'illat* antara keduanya. Letak kesamaannya adalah, baik *tadlīs* kualitas maupun *tadlīs* harga sama-sama merupakan modus menyembunyian informasi yang dilakukan salah satu pihak yang bertransaksi untuk mengelabui pihak yang lain demi meraih keuntungan yang lebih besar. Pelaku *tadlīs* kualitas memperoleh keuntungan lebih besar karena barangnya yang berkualitas rendah bisa terjual seharga barang yang berkualitas tinggi. Sedangkan pelaku *tadlīs* harga memperoleh keuntungan lebih besar karena *mark up* harga yang dilakukannya dapat mendongkrak harga jual barangnya di atas rata-rata harga pasar.

Berdasarkan hujah yang sudah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum dari modus “pasang harga tinggi” –yang tidak lain adalah *tadlīs* harga-- yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pusat Grosir Surabaya, ialah munculnya hak *khiyār* pada pihak pembeli --dalam waktu tiga hari sejak ia mengetahui adanya *mark up* harga oleh penjual—yakni hak untuk mengembalikan barang dan menarik kembali harga yang telah dibayarkannya atau tetap menahan barang itu dan menarik kembali kelebihan nilai harga di atas harga pasar yang telah dibayarkannya.